

## SINOPSIS

Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terkenal sebagai kota pelajar dan kota budayasehingga banyak orang yang berdatangan untuk berkunjung ataupun tinggal di kota Yogyakarta ini, akhirnya kota Yogyakarta menjadi padat dan arus lalu lintas pun semakin tidak terkendali. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta mengambil jalan keluar untuk bekerja sama dengan PT.JTT. Selanjutnya atas persetujuan DPRD DIY berupaya menghadirkan Bus Trans Jogja yang menggunakan sistem *buy the service* . Setelah sistem itu dijalankan maka timbul persoalan, benarkah kebijakan pengoperasian Bus Trans Jogja merupakan strategi yang *efektif* untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Yogyakarta.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. sumber data dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* didapatkan dari wawancara dari beberapa sumber seperti kabag UPTD Trans Jogja di Dinas Perhubungan kota Yogyakarta, Fraksi PKS, dan pengguna Trans Jogja. Sedangkan data *sekunder* penelitian diperoleh di Dinas Perhubungan dan DPRD DIY. Teknik pengumpulan data dengan Observasi dan Wawancara.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Angkutan Umum dijalan di Wilayah Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2008 Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu Tentang keberadaan angkutan umum termasuk Bus Trans Jogja diatur pemerintah melalui Undang-undang DLLAJ Nomor 14 Tahun 1992 dan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor 274 / lik.105/DPRD / Tahun 1996 yang memuat tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) Evaluasi kebijakan Trans Jogja ini ternyata tidak sepenuhnya berhasil karena masih banyak kendala yang menjadi penghambat keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini; (2) Faktor Pendukung kebijakan Trans Jogja : dirasa lebih nyaman dengan berbagai fasilitas seperti bebas pengamen, bebas pengasong, tertib ( karena hanya menaikkan penumpang ditempat yang telah disediakan ), dan jaminan tepat waktu; (3) Faktor penghambat kebijakan Trans Jogja seperti : Pemilik kendaraan tetap menggunakan kendaraan pribadinya yang sudah terlanjur dimiliki, karena dinilai juga lebih cepat, hemat, dan mudah.